



**TINGKAT PEMAHAMAN GURU BK TENTANG
PERAN DAN FUNGSI MUSYAWARAH GURU
BIMBINGAN DAN KONSELING (MGBK) DI SMP
NEGERI SE-KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Program studi Bimbingan dan Konseling

Oleh
Danty Ismi Harva Firstilia
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
1301412022

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Danty Ismi Harva Firstilia
NIM : 1301412022
Jurusan : Bimbingan dan Konseling, S1
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Tingkat Pemahaman Guru BK Tentang Peran dan Fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) di SMP Negeri Se-Kota Semarang” saya tulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri yang saya hasilkan setelah melalui penelitian, pembimbingan, diskusi, dan pemaparan/ujian. Semua kutipan baik yang diperoleh dari sumber kepustakaan, wahana elektronik, maupun sumber lainnya telah disertai keterangan mengenai sumbernya dengan cara sebagaimana yang lazim dalam penulisan skripsi. Sepenuhnya seluruh isi karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian, harap pernyataan ini dapat digunakan seperlunya.

UNNES
UNIVERSITA

Semarang, Desember 2016



Danty Ismi Harva Firstilia
NIM. 1301412022

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tingkat Pemahaman Guru BK Tentang Peran dan Fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) di SMP Negeri Se-Kota Semarang” telah dipertahankan di hadapan sidang panitia ujian skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Desember 2016

Panitia Ujian :



Sekretaris

Mulawarman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19771223 200501 1 001

Penguji Utama

Kusnarto Kurniawan, M.Pd., Kons
NIP. 197101142005011002

Penguji II/Pembimbing I

Drs. Eko Nusantoro, M.Pd., Kons
NIP. 19600205 199802 1 001

Penguji III/Pembimbing II

Dr. Supriyo, M.Pd
NIP. 19510911 197903 1 002

PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Danty Ismi Harva Firstilia
NIM : 1301412022
Jurusan : Bimbingan dan Konseling, S1
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Tingkat Pemahaman Guru BK Tentang Peran dan Fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) di SMP Negeri Se-Kota Semarang” saya tulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri yang saya hasilkan setelah melalui penelitian, pembimbingan, diskusi, dan pemaparan/ujian. Semua kutipan baik yang diperoleh dari sumber kepustakaan, wahana elektronik, maupun sumber lainnya telah disertai keterangan mengenai sumbernya dengan cara sebagaimana yang lazim dalam penulisan skripsi. Sepenuhnya seluruh isi karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian, harap pernyataan ini dapat digunakan seperlunya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, Desember 2016

Danty Ismi Harva Firstilia

NIM. 1301412022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Pahamilah diri kita sendiri, sebelum kita dapat memahami orang lain.”

(Danty Ismi Harva Firstilia)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Almamater BK UNNES

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tingkat Pemahaman Guru BK tentang Peran dan Fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) di SMP Negeri se-Kota Semarang”. Skripsi ini menyajikan tingkat pemahaman guru BK mengenai peran dan fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) di SMP Negeri se-Kota Semarang.

Penulis menyadari adanya dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada Drs. Eko Nusantoro M.Pd, Kons, Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini dan Dr. Supriyo, M.Pd, Dosen Pembimbing II yang telah memotivasi dan kesabaran dalam membimbing penyusunan skripsi ini.

Selain dosen pembimbing, tidak lupa penulis juga sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan ijin penelitian serta memberikan motivasinya.
3. Kusnarto Kurniawan, M.Pd, Kons. Penguji Utama yang telah menguji skripsi ini dalam sidang skripsi.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang yang telah memberikan ijin dalam mengadakan penelitian.

5. Kepala SMP Negeri Se-Kota Semarang yang telah memberikan ijin dalam mengadakan penelitian
6. Guru SMP Negeri Se-Kota Semarang sebagai responden penelitian yang telah memberikan waktu dan kerja samanya.
7. Orang tua di rumah yang senantiasa memberikan doa dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Teman-teman Reang kos tercinta yang selama ini telah memberikan banyak pelajaran dan kenangan indah.
9. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan. Terima kasih.



Semarang, Desember 2016
Penulis
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Firstilia. Danty Ismi Harva. 2016. Tingkat Pemahaman Guru BK tentang Peran dan Fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) di SMP Negeri Se-Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Drs. Eko Nusantoro, M.Pd., Kons dan Dosen Pembimbing II Dr. Supriyo, M.Pd

Kata Kunci : Guru BK, peran MGBK, fungsi MGBK

Pemahaman Guru BK tentang peran dan fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) sangat diperlukan karena kegiatan program bimbingan dan konseling berarti suatu bentuk kegiatan yang mengatur kerja, prosedur kerja, dan pola kerja atau mekanisme kerja kegiatan bimbingan dan konseling, dan hal ini dapat diketahui salah satunya melalui organisasi MGBK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman guru BK tentang peran dan fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) di SMP Negeri se-Kota Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru BK yang ada di SMP Negeri Se-Kota Semarang sebanyak 140 guru BK. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan cluster random sampling. sampel pada penelitian ini adalah 50% dari jumlah poplasi, dalam penelitian ini diambil sebesar 72 guru BK sebagai sampel. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Instrumen tersebut telah diuji cobakan menggunakan validitas dengan rumus product moment dan reliabilitas dengan rumus alpha. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan mean dan standar deviasi.

Hasil penelitian dari Tingkat Pemahaman Guru BK tentang peran dan fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) yang telah dilakukan adalah pemahaman guru BK tentang peran MGBK berada pada kategori tinggi (sebesar 38 responden), dari delapan indikator terdapat dua indikator yang memiliki kecenderungan paling tinggi. Indikator tersebut adalah indikator mengakomodasi aspirasi dari anggota, masyarakat, dan siswa serta indikator berperan berkolaborasi dengan unit terkait dan organisasi profesi yang relevan. Pemahaman guru BK tentang fungsi MGBK berada pada kategori tinggi, dari lima indikator terdapat satu indikator yang memiliki kecenderungan lebih tinggi daripada indicator lainnya. Indikator tersebut adalah indikator fungsi peningkatan kemampuan profesional.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum tingkat pemahaman guru BK tentang peran dan fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) berada pada kategori tinggi. Saran yang dapat diberikan adalah (1) Bagi dinas pendidikan kota Semarang, dapat melakukan pembinaan terkait agenda kegiatan atau pertemuan yang dilakukan oleh MGBK, agar MGBK dapat meningkatkan agenda pertemuan atau kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan pemerintah, (2) Bagi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh MGBK.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
PERNYATAAN.....	III
MOTO DAN PERSEMBAHAN	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Pemahaman Guru BK	16
2.2.1 Pemahaman	17
2.2.1.1 Pengertian Pemahaman	17
2.2.1.2 Tingkatan Pemahaman.....	18
2.2.2 Guru Bimbingan dan Konseling (Konselor).....	21
2.2.2.1 Pengertian Guru BK	21
2.2.2.2 Tugas-Tugas Guru BK	22
2.2.3 Pemahaman Guru BK	24
2.3 Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)	25
2.3.1 Pengertian Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) ..	25
2.3.2 Dasar Pendirian dan Latar Belakang Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK).....	27
2.3.3 Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK).....	30
2.3.3.1 Aspek-Aspek Peran MGBK.....	34
2.3.4 Fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)	37
2.3.4.1 Aspek-Aspek Fungsi Konseling MGBK.....	39

2.3.5 Tujuan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK).....	41
2.3.6 Prinsip Kerja Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling.....	42
2.4 Pemahaman Guru BK Tentang Peran dan Fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)	43
2.4.1 Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)	45
2.4.2 Fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)	57

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	65
3.2 Variabel Penelitian	67
3.2.1 Identifikasi Variabel.....	67
3.2.2 Definisi Operasional Variabel.....	67
3.3 Populasi dan Sampel	68
3.3.1 Populasi Penelitian	68
3.3.2 Sampel Penelitian.....	68
3.4 Metode dan Alat Pengumpulan Data	70
3.4.1 Metode Pengumpulan Data	71
3.4.2 Alat Pengumpulan Data	71
3.5 Penyusunan Instrumen	73
3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen	74
3.6.1 Validitas	74
3.6.2 Reliabilitas	76
3.7 Teknik Analisis Data.....	78

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	82
4.1.1 Hasil Analisis Sub Variabel Peran MGBK	82
4.1.1.1 Hasil Analisis Indikator Melindungi Kepentingan Para Anggota dan Kemandirian Serta Kewibawaan Kelembagaan Secara Keseluruhan	85
4.1.1.2 Hasil Analisis Indikator Berperan Meningkatkan dan Mengembangkan Karir	86
4.1.1.3 Hasil Analisis Indikator Berperan Meningkatkan dan Mengembangkan Kemampuan.....	88
4.1.1.4 Hasil Analisis Indikator Meningkatkan Kewenangan Profesional	89
4.1.1.5 Hasil Analisis Indikator Berperan Meningkatkan Martabat dan Kesejahteraan Anggotanya	91
4.1.1.6 Hasil Analisis Indikator Mengakomodasi Aspirasi dari Anggota, Masyarakat dan Siswa.....	92
4.1.1.7 Hasil Analisis Indikator Melaksanakan Perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses pemberian layanan.....	94

4.1.1.8 Hasil Analisis Indikator Berkolaborasi dengan unit terkait dan organisasi profesi yang relevan.....	96
4.1.2 Hasil Analisis Sub Variabel Fungsi MGBK	97
4.1.2.1 Hasil Analisis Indikator Fungsi Pemersatu	99
4.1.2.2 Hasil Analisis Indikator Fungsi Informasi	101
4.1.2.3 Hasil Analisis Indikator Fungsi Produksi	102
4.1.2.4 Hasil Analisis Indikator Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional	104
4.1.2.5 Hasil Analisis Indikator Fungsi Pengembangan Profesi	105
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	107
4.3 Keterbatasan Penelitian	134
 BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	135
5.2 Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	137



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Daftar Populasi SMP Negeri Se-Kota Semarang.....	68
3.2 Daftar Sampel Penelitian	70
3.3 Cara Penyekoran untuk Masing-Masing Pernyataan	73
3.4 Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha	78
3.5 Kategori Tingkat Pemahaman Guru BK tentang Peran MGBK.....	79
3.6 Kategori Tingkat Pemahaman Guru BK tentang Fungsi MGBK	80
4.1 Distribusi frekuensi Tingkat Pemahaman Guru BK Tentang Peran MGBK di SMP Negeri Se-Kota Semarang.....	83
4.2 Distribusi frekuensi tentang Tingkat Pemahaman Guru BK Tentang Fungsi MGBK di SMP Negeri Se-Kota Semarang	98



DAFTAR GAMBAR

Diagram	Halaman
4.1 Diagram Frekuensi Tingkat Pemahaman Guru BK Tentang Peran MGBK di SMP Negeri Se-Kota Semarang	83
4.2 Diagram Frekuensi tentang indikator melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibawaan kelembagaannya secara keseluruhan/dengan membina dan menegakkan kode etik profesi	85
4.3 Diagram Frekuensi tentang indikator berperan meningkatkan dan mengembangkan karir.....	87
4.4 Diagram Frekuensi tentang indikator berperan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan.....	89
4.5 Diagram Frekuensi tentang indikator berperan meningkatkan kewenangan profesional.....	90
4.6 Diagram Frekuensi tentang indikator berperan meningkatkan martabat dan kesejahteraan anggotanya.....	92
4.7 Diagram Frekuensi tentang indikator berperan mengakomodasi aspirasi dari anggota, masyarakat dan siswa.....	93
4.8 Diagram Frekuensi tentang indikator melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses pemberian layanan.....	94
4.9 Diagram Frekuensi tentang indikator berperan berkolaborasi dengan unit terkait dan organisasi profesi yang relevan.....	96
4.10 Diagram Frekuensi tentang Fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) di SMP Negeri se-Kota Semarang	98
4.11 Diagram Frekuensi tentang indikator fungsi pemersatu	100
4.12 Diagram Frekuensi tentang indikator fungsi informasi	101
4.13 Diagram Frekuensi tentang indikator fungsi produksi	103
4.14 Diagram Frekuensi tentang indikator fungsi peningkatan kemampuan professional	104
4.15 Diagram Frekuensi tentang indikator fungsi pengembangan profesi	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Populasi SMP Negeri Se-Kota Semarang.....	141
2. Daftar Sampel Guru BK	143
3. Kisi-Kisi Instrumen Sebelum <i>Try Out</i>	146
4. Instrumen <i>Try Out</i>	153
5. Tabulasi Uji Coba Instrumen	160
6. Uji Validitas	165
7. Uji Reliabilitas	244
8. Kisi-Kisi Instrumen Setelah <i>Try Out</i>	245
9. Instrumen Penelitian Setelah <i>Try Out</i>	253
10. Tabulasi Hasil Penelitian.....	260
11. Pedoman Wawancara Tentang MGBK.....	276
12. Hasil Wawancara Data Awal	277
13. Dokumentasi	285
14. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	286



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu pentingnya sekolah adalah untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan yang tidak didapatkan diluar bangku sekolah. Dalam menempuh pendidikan, siswa juga tidak hanya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, tetapi dengan belajar dan pendidikan di sekolah siswa juga dapat mengembangkan kemampuan lain dari dalam dirinya. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan lain yang dimiliki siswa ialah melalui bimbingan dan konseling. Bimbingan dan Konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli (siswa) guna bertujuan terentaskannya masalah siswa dan agar siswa dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan potensinya. Selain itu dengan adanya bimbingan dan konseling juga membantu siswa dalam mencapai tugas-tugas perkembangan sehingga dapat tercapai perkembangan yang optimal.

Dalam pelaksanaannya, bimbingan dan konseling merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan program pendidikan di sekolah. Untuk mewujudkan program pendidikan yang berhasil di sekolah, diperlukan pelayanan bimbingan dan konseling yang dapat berperan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa serta mencapai tugas perkembangan siswa, dibutuhkan pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu. Pelayanan bimbingan dan konseling yang

bermutu ialah pelayanan yang dapat mengarahkan, mengembangkan potensi, dan mengembangkan tugas-tugas perkembangan peserta didik yang menyangkut aspek kognitif, sosial, dan emosionalnya. Untuk melaksanakan pelayanan BK yang bermutu, dibutuhkan kompetensi yang mumpuni yang sudah semestinya dimiliki oleh seorang konselor yang profesional.

Sebagai sebuah profesi, tentunya banyak pula organisasi profesi yang dijadikan sebagai wadah dari profesi itu sendiri. Organisasi menurut Tossi dkk dalam Munandar (2014: 247) adalah sebuah grup yang terdiri dari kelompok orang-orang, atau dapat dikatakan juga terdiri dari kelompok-kelompok tenaga kerja (dalam hal organisasi perusahaan) yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasinya. Untuk mencapai organisasi dikembangkan dan dipertahankan pola-pola tertentu yang cukup stabil dan dapat diperkirakan sebelumnya. Sebagaimana fungsi organisasi sebagai media menyatukan persepsi dan tujuan bersama yang hendak dicapai, kehadiran organisasi khususnya dibidang bimbingan dan konseling di lingkungan lembaga pendidikan menjadi sangat penting. Hal ini karena kegiatan program bimbingan dan konseling merupakan suatu bentuk kegiatan yang mengatur kerja, prosedur kerja, dan pola kerja atau mekanisme kerja kegiatan bimbingan dan konseling. Kegiatan bimbingan ini terfokus pada pelayanan yang diberikan kepada para siswa dan rekan tenaga pendidik serta orangtua siswa, dan evaluasi program bimbingan.

Dalam bidang bimbingan dan konseling tercatat ada beberapa organisasi profesi. Organisasi-organisasi tersebut diantaranya adalah ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) merupakan suatu organisasi profesi yang

beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan kualifikasi pendidikan akademik strata satu (S-1) dari program studi bimbingan dan konseling dan program pendidikan konselor (PPK), MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling) adalah kegiatan musyawarah yang bertujuan meningkatkan kualifikasi guru bimbingan dan konseling, dan IMABKIN (Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia) yang merupakan suatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di DIKTI.

Pada penelitian ini yang akan dibahas adalah organisasi bimbingan dan konseling yang menaungi para guru atau konselor sekolah yaitu MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling). Seperti yang sudah dijelaskan di atas, MGBK adalah kegiatan musyawarah yang bertujuan meningkatkan kualifikasi guru bimbingan dan konseling. Menurut Saondi (2010: 80) MGMP/MGBK merupakan forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran atau guru BK yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan tukar pengalaman yang antar anggota satu dengan lainnya. MGBK ini diikuti oleh seluruh guru BK dari sekolah swasta maupun negeri. MGBK diadakan di tiap-tiap provinsi/kota dengan target pertemuan atau kegiatan minimal 6 kali tiap semesternya (Depdiknas, 2009: 12). MGBK membahas mengenai permasalahan guru-guru BK di tiap-tiap sekolah. Bidang teknologi dan informasi yang meliputi pembuatan web, blog, *e-mail* atau sekadar *akses internet*, menjadi masalah utama yang dihadapi para guru tersebut.

Sebagai induk dari organisasi profesi bidang bimbingan dan konseling, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) tentunya memiliki peran tersendiri dalam mengembangkan organisasi bimbingan dan konseling lainnya seperti MGBK. Dalam hal ini, peran ABKIN untuk MGBK adalah turut serta mengembangkan dan pembinaan organisasi MGBK itu sendiri, agar MGBK dapat menjadi organisasi profesi yang profesional. Selain itu, ABKIN bisa berperan untuk menyalurkan informasi dari pemerintah atau dari ABKIN itu sendiri kepada MGBK.

Program kerja MGBK secara umum terdiri dari empat macam, yaitu program kerja Pengurus MGBK akan menitik beratkan pada upaya di dalam meningkatkan keterampilan proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di luar sekolah, salah satu contoh program yang akan dilaksanakan yaitu melakukan *sharing* informasi antar guru bimbingan dan konseling / konselor sekolah tentang bagaimana kegiatan praktik bimbingan dan konseling yang selama ini dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan teori-teori konseling, dengan adanya MGBK, para guru BK dapat saling berinteraksi guna meningkatkan pelayanan terhadap siswa, dengan adanya MGBK diharapkan dapat meluncurkan inovasi baru untuk diaplikasikan di sekolah masing-masing, tentunya inovasi yang berkaitan dengan bimbingan konseling siswa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Winarno (2014: 82) diketahui bahwa peran MGBK begitu besar dalam meningkatkan kompetensi profesional guru BK, walaupun belum berperan secara maksimal. Ada beberapa hal yang mengakibatkan tidak maksimalnya peran MGBK di Kabupaten Boyolali, hal ini

dikarenakan beberapa faktor, diantaranya: a) keterbatasan frekuensi pertemuan dalam satu semester, rata-rata satu semester hanya 4 kali pertemuan; b) Kesungguhan peserta untuk mengikuti MGP masih rendah, sering menganggap remeh, sehingga kegiatan MGP hanya sebagai ajang berkumpul atau temu kangen antar sesama guru pembimbing; c) Kehadiran peserta dalam mengikuti MGP kurang disiplin, banyak yang datang terlambat, terkadang hanya absen terus pulang.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa guru BK di kabupaten Boyolali masih belum memahami bagaimana peran dan fungsi MGP/MGBK, hal ini terlihat dari kesungguhan guru BK yang masih rendah, sering menganggap remeh dan menjadikan MGP/MGBK hanya sebagai tempat untuk berkumpul atau bertemu kangen dengan teman-teman sejawat. Selain itu, guru BK juga menjadikan MGP/MGBK sebagai suatu formalitas dari profesi yang diembannya, hal ini terlihat dari kehadiran peserta dalam mengikuti MGP/MGBK yang kurang disiplin, datang terlambat dan hanya absen saja lalu kemudian pulang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizqiani di Purwokerto tahun 2014 menunjukkan bahwa keaktifan guru BK dalam mengikuti organisasi profesi guru BK (MGBK) menunjukkan persentase sebesar 17,6% dan dapat dikatakan keaktifan guru BK untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh MGBK sebesar 17,6% hal ini menunjukkan bahwa guru BK di Purwokerto belum memahami bagaimana peran dan fungsi MGBK sehingga guru BK tidak aktif untuk mengikuti kegiatan MGBK. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti dkk (2013) yang melakukan penelitian tentang keaktifan guru BK dalam mengikuti

organisasi profesinya di Lampung. Dalam penelitian ini, Febrianti memperoleh data bahwa sebanyak 58,3% guru BK belum aktif mengikuti organisasi profesinya. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa guru BK belum mengetahui peran serta fungsi dari organisasi profesi bagi profesional, dalam hal ini adalah MGBK. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2015) yang melakukan penelitian di Kota Malang. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa guru BK SMA di Kota Malang memiliki pengetahuan yang tinggi (100%) terhadap Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK). Sementara itu, Di kota Semarang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Basuki (2015) dapat diketahui bahwa peran MGBK di SMP Negeri kota Semarang tahun 2015 berada pada kriteria cukup baik dengan persentase 57%.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan pada hari Jumat, 3 Juni 2016 melalui wawancara dengan guru BK di SMP Negeri 2 Semarang, menunjukkan bahwa salah satu guru BK di sekolah tersebut belum memahami betul tentang bagaimana peran dan fungsi MGBK. “saya belum paham betul tentang bagaimana peran dan fungsi MGBK. Yang saya tahu peran guru BK adalah tempat kita berkumpul untuk membahas masalah terkait dengan bidang bimbingan dan konseling, dan saya sendiri kan memang jarang mengikuti pertemuan di MGBK itu”. Sementara itu, wawancara juga dilakukan oleh peneliti pada guru BK di SMP Negeri 41 Semarang yang dilakukan pada hari Sabtu, 4 Juni 2016, salah satu guru mengungkapkan bahwa beliau tidak mengetahui peran dan fungsi dari MGBK itu sendiri. “Fungsi dan perannya? Kalau untuk peran dan

fungsinya saya kurang tahu juga, namun yang jelas MGBK adalah musyawarah guru bimbingan dan konseling yang dijadikan tempat berkumpul kami para guru BK, dan kalau untuk MGBK tingkat kota sendiri pertemuannya jarang dilakukan dan hanya perwakilan saja untuk berkumpul”.

Berdasarkan fenomena yang terjadi lapangan guru BK mengikuti organisasi MGBK sebagai formalitas dari profesi yang diembannya. Selain itu, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 20 April 2016 dengan salah satu guru BK yang dulu pernah melakukan penelitian terkait MGBK SMP kota Semarang. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa setiap kali pertemuan MGBK, tidak semua anggotanya dapat hadir dan mengikuti rapat pertemuan tersebut, namun hanya perwakilan dari tiap-tiap sekolah, biasanya tiap sekolah mengirimkan satu atau dua perwakilannya saja. Belum lagi pertemuan tersebut tidak intensif dilaksanakan, dan biasanya dalam MGBK SMP kota Semarang pertemuan dilakukan tiga bulan sekali namun itu saja kadang tidak dapat terealisasikan, padahal seharusnya dalam Depdiknas (2009: 12) menyebutkan bahwa MGBK itu melakukan pertemuan dengan para anggotanya sebanyak dua belas kali dalam satu tahun, hal ini berarti ketika dalam satu semester guru BK harus melakukan pertemuan sebanyak enam kali. Oleh karena itu sebagian guru BK belum mengetahui peran dan fungsi MGBK, sehingga konselor pun tidak terlalu serius dalam mengikuti kegiatan MGBK tersebut, walaupun agenda pertemuan dari MGBK tersebut jarang dilakukan, namun sekali diadakan pertemuan banyak dari konselor tersebut yang justru asyik sendiri ketika ada pertemuan di forum MGBK tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait tingkat pemahaman konselor tentang peran dan fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Seberapa tinggi tingkat pemahaman guru BK tentang peran musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK) SMP Negeri se-Kota Semarang?
2. Seberapa tinggi tingkat pemahaman guru BK tentang fungsi musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK) SMP Negeri se-Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan masalah yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat pemahaman guru BK tentang peran musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK) SMP Negeri se-Kota Semarang.
2. Mengetahui tingkat pemahaman guru BK tentang fungsi musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK) SMP Negeri se-Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang bimbingan dan konseling, penelitian ini

dapat digunakan sebagai bahan renungan konselor terkait organisasi profesi yang ditekuninya sebagai bahan dalam melakukan kegiatan akademik maupun non akademik.

1.4.2 Praktis

1. Bagi guru BK, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengukur pemahaman tentang peran dan fungsi musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK) selaku organisasi profesi yang wajib diikuti oleh tenaga profesional.
2. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui pemahaman guru BK terkait peran dan fungsi dari organisasi MGBK yang diikuti oleh guru-guru BK di sekolah.
3. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan, pengetahuan dan pengalaman agar peneliti juga dapat mengetahui peran dan fungsi MGBK sebelum peneliti benar-benar terjun ke lapangan sebagai guru BK.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai gambaran umum yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi. Penulis membagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab agar pembahasannya lebih teratur dan sistematis. Adapun penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 yaitu landasan teori yang berisi penelitian terdahulu, Pemahaman Guru BK yang terdiri dari pemahaman, guru BK, serta pemahaman guru BK, bab dua ini juga terdapat sub bab Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) yang terdiri dari Pengertian MGBK, Dasar Pendirian dan latar belakang MGBK, Peran MGBK, Fungsi MGBK, Tujuan MGBK, dan Prinsip Kerja MGBK, Pemahaman Guru BK tentang peran dan fungsi MGBK.

Bab 3 yaitu metode penelitian yang berisi jenis penelitian, variabel penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian data, penyusunan instrumen, validitas dan reliabilitas instrumen.

Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan dan yang berisi hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti.

Bab 5 yaitu penutup yang berisi simpulan dan saran yang berisi simpulan dari skripsi beserta saran-sarannya.

Daftar pustaka yang berisi daftar rujukan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian ilmiah ini dibutuhkan adanya tinjauan pustaka yang kuat. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan semestinya, khususnya dalam menjawab permasalahan yang diajukan pada penelitian ini. Dalam bab dua ini akan diuraikan tentang beberapa hal penting yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu tentang penelitian terdahulu, pemahaman guru BK, musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK), dan pemahaman guru BK tentang peran dan fungsi musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK).

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu, disajikan penelitian-penelitian mengenai MGBK yang telah dilakukan oleh Agus Winarno (2013), Mohammad Imam Farisi (2013), Darmawan (2014), Belinda Mega Candy Wijaya (2015), dan Tentrem Basuki (2015)

2.1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Agus Winarno

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Agus Winarno pada tahun 2013 di Kabupaten Boyolali dapat diketahui bahwa keberadaan MGP/MGBK sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh guru BK yang tergabung dalam MGBK Kabupaten Boyolali, frekuensi dari keberadaan MGP/MGBK yang sangat penting ini mencapai 43 dari 80 responden. Sedangkan untuk aktivitas keanggotannya, sebanyak 74 responden atau 92,5% anggotanya berpartisipasi aktif dalam MGBK.

Manfaat yang didapatkan anggota melalui kegiatan MGP/MGBK ini adalah menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan ke-Bk an, dan sejumlah 26 responden memilih ini. Materi yang paling sering dibahas dalam kegiatan MGP/MGBK adalah program layanan/program kerja, sebanyak 54 responden memilih pernyataan tersebut. Secara umum, penelitian yang dilakukan Agus Winarno tersebut menghasilkan informasi bahwa peran MGP/MGBK begitu besar dalam meningkatkan kompetensi guru BK SMP kabupaten Boyolali, walaupun belum dapat mencapai 100% dalam meningkatkan kompetensi guru BK.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah dengan mengetahui peran MGP/MGBK yang begitu besar dalam meningkatkan kompetensi profesional guru BK, namun dari guru BKnya sendiri tidak memanfaatkan hal tersebut dengan maksimal, sehingga yang terjadi MGBK pun tidak berperan secara maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Winarno lebih fokus kepada peran MGBK dalam meningkatkan kompetensi profesional guru BK, sedangkan pada penelitian yang saya lakukan lebih kepada pemahaman guru BK tentang peran dan fungsi dari Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK).

2.1.2 Penelitian yang dilakukan Mohammad Imam Farisi

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Imam Farisi pada tahun 2013 ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan organisasi profesi kependidikan yang ada di Indonesia. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pembentukan organisasi profesional kependidikan di Indonesia dapat dikatakan relatif muda. Setidaknya organisasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor

akademik profesional, yuridis-formal, dan juga sosial politik organisasi. Organisasi profesional kependidikan di Indonesia baru melaksanakan fungsi pengembangan profesional dan advokasi, sementara fungsi regulasi (standarisasi dan akreditasi, sertifikasi, dan atau lisensi) hanya dilakukan oleh beberapa organisasi profesional dan masih sebatas pada perumusan kode etik profesi, sementara pengawasan dan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi belum efektif dilakukan. Secara umum fungsi-fungsi regulasi juga dibawah kendali dan koordinasi lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Kementrian Dikbud dan/atau Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Penelitian dari Muhammad Imam Farisi yang berkaitan dengan dinamika organisasi keprofesian kependidikan di Indonesia dapat dijadikan landasan pula bagi peneliti terkait organisasi keprofesian bimbingan dan konseling yakni MGBK.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama meneliti organisasi profesi kependidikan, namun dalam hal ini yang diteliti oleh Mohammad Imam Farisi adalah untuk mengetahui keadaan organisasi profesi keguruan secara umum, namun untuk penelitian yang saya lakukan hanya meneliti organisasi profesi yang menaungi guru BK (MGBK). Dalam penelitian yang dilakukan Mohammad Imam Farisi diketahui bahwa organisasi profesional kependidikan terbilang masih relatif muda. Untuk itulah, dengan penelitian saya ingin mengetahui bagaimana pemahaman guru BK terhadap peran dan fungsi organisasi profesi MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling).

2.1.3 Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Darmawan pada 2014 di Kabupaten Tasikmalaya diketahui bahwa kegiatan MGBK kerja berpengaruh positif terhadap kinerja guru BK, artinya semakin baik kegiatan MGBK yang dimiliki, maka akan semakin baik pula kinerja guru BKnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa peran MGBK sangat penting untuk meningkatkan kinerja guru BK. Hal ini terjadi karena Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) merupakan forum kegiatan guru mata pelajaran, yang dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan keterlibatan langsung unit-unit kerja struktural yang terkait sebagai pembinaanya.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan dapat diketahui bahwa melalui penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2014) ini dapat mengetahui bahwa MGBK dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja guru BK yang itu berarti semakin baik MGBK disuatu kota atau kabupaten maka akan semakin baik pula kinerja guru BK di tempat tersebut. Oleh karena itu, agar guru BK dapat memaksimalkan kegiatan yang akan dilakukan dalam forum MGBK, guru BK sendiri harus mengetahui dan memahami apa itu peran serta fungsi MGBK. Penelitian ini lebih menekankan pada peran MGBK dalam meningkatkan kinerja guru BK, sedangkan penelitian yang akan saya

lakukan lebih fokus kepada pemahaman guru BK tentang peran dan fungsi dari MGBK.

2.1.4 Penelitian yang dilakukan oleh Bellinda Mega Candy Wijaya

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Bellinda Mega Candy Wijaya pada tahun 2015 diketahui bahwa 100% guru BK yang menjadi respondennya yakni pada guru BK SMA di Kota Malang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang MGBK. Sebanyak 33,33% guru BK memiliki persepsi yang cukup tentang MGBK dan sebanyak 66,67% memiliki persepsi cukup positif terhadap MGBK. Sebanyak 8,33% guru BK memiliki sikap positif terhadap MGBK dan sebanyak 91,67% memiliki sikap cukup positif terhadap MGBK.

Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa sangat banyak guru BK SMA Negeri kota Malang yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang MGBK (mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, peranan, tugas, dan kegiatan). Sangat banyak guru BK yang memiliki persepsi cukup positif terhadap MGBK. Dan sangat banyak guru BK yang memiliki sikap cukup positif terhadap MGBK.

Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian ini sama dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu ingin mengetahui bagaimana pemahaman guru BK terhadap MGBK, hanya saja pada penelitian yang dilakukan oleh Bellinda Mega Candy Wijaya lebih kompleks meneliti tentang MGBK, yakni meneliti tentang pengetahuan, persepsi serta sikap guru BK terhadap organisasi profesi yang menaunginya yakni Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), sedangkan pada penelitian yang akan saya

lakukan ingin mengetahui dan menitik beratkan pada pemahaman guru BK tentang peran dan fungsi MGBK.

2.1.5 Penelitian yang dilakukan oleh Tentrem Basuki

Penelitian yang dilakukan oleh Tentrem Basuki pada tahun 2015 ini dapat diketahui bahwa secara keseluruhan peran MGBK SMP Negeri Kota Semarang pada tahun 2015 dengan sampel penelitian sejumlah 30 guru BK dari 15 SMP Negeri dapat dilihat sebesar 37% atau sejumlah 11 guru BK menilai MGBK SMP Kota Semarang memiliki peran baik, 57% atau sejumlah 17 guru BK menilai MGBK SMP Kota Semarang memiliki peran cukup baik, dan 7% atau sejumlah 2 guru BK menilai MGBK SMP Kota Semarang memiliki peran kurang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) di SMP Negeri Kota Semarang tahun 2015 berada pada kriteria cukup baik dengan persentase 57%.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah sama-sama meneliti tentang peran MGBK, namun bedanya pada penelitian yang dilakukan oleh Tentrem Basuki (2015) ini lebih mengacu pada seberapa besar peran MGBK dalam kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru BK, namun pada penelitian yang akan saya lakukan lebih mengacu pada pemahaman guru BK mengenai MGBK khususnya tentang peran dan fungsi MGBK.

2.2 Pemahaman Guru BK

Pada sub bab pemahaman guru BK ini akan dijelaskan materi tentang konsep pemahaman dan konsep guru BK.

2.2.1 Pemahaman

2.2.1.1 Pengertian Pemahaman

Menurut Winkel dan Mukhtar dalam Sudaryono (2012: 44) pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Sedangkan Pengertian pemahaman yang dikemukakan oleh para ahli seperti Benjamin S. Bloom dalam Sudijono (2009: 50) adalah sebagai berikut:

“Pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan penjelasan atau member uarian yang lebih rinci tentang hal itu dengan kata-kata sendiri”.

Sementara itu, menurut Taksonomi Bloom dalam Daryanto (2008: 106)

mengemukakan:

“Pemahaman (*comprehension*) kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkan dengan hal-hal lain. Bentuk soal yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan ini adalah pilihan ganda atau uraian”.

Menurut Sardiman, A.M (2006: 43) “pemahaman (*comprehension*) adalah menguasai sesuatu dengan pikiran atau mengerti secara mental makna dan filosofisnya, maksud dan implikasi serta aplikasinya”. Dapat dimaknai bahwa pemahaman merupakan kerja pikiran yang mampu untuk menguasai sesuatu hal dengan mengerti maksud dari hal tersebut, serta mengerti implikasi serta aplikasinya.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti tentang sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang pendidik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang suatu hal dengan menggunakan kata-kata sendiri sehingga peserta didik mengerti apa yang disampaikan.

2.2.1.2 Tingkatan Pemahaman

Memahami (*Understand*) merupakan kegiatan mengkonstruksi makna atau pengertian berdasarkan pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, atau mengintegrasikan pengetahuan yang baru ke dalam skema yang telah ada dalam pemikiran. Karena penyusunan skema adalah konsep, maka pengetahuan konseptual merupakan dasar pemahaman.

Kategori memahami mencakup tujuh proses kognitif menurut Bloom dalam Widodo (2006:7) yaitu :

1. Menafsirkan (*interpreting*)
Mengubah dari satu bentuk informasi ke bentuk informasi yang lainnya, misalnya dari kata-kata ke grafik atau gambar, atau sebaliknya, dari kata-kata ke angka, atau sebaliknya, maupun dari kata-kata ke kata-kata, misalnya meringkas atau membuat parafrase.
2. Memberikan contoh (*exemplifying*)
Memberikan contoh dari suatu konsep atau prinsip yang bersifat umum. Memberikan contoh menuntut kemampuan mengidentifikasi

ciri khas suatu konsep dan selanjutnya menggunakan ciri tersebut untuk membuat contoh. Istilah lain untuk memberikan contoh adalah memberikan ilustrasi (*illustrating*) dan mencontohkan (*instantiating*).

3. Mengklasifikasikan (*classifying*)
Mengenali bahwa sesuatu (benda atau fenomena) masuk dalam kategori tertentu. Termasuk dalam kemampuan mengklasifikasikan adalah mengenali ciri-ciri yang dimiliki suatu benda atau fenomena. Istilah lain untuk mengklasifikasikan adalah mengkategorisasikan (*categorising*).
4. Meringkas (*summarising*)
Membuat suatu pernyataan yang mewakili seluruh informasi atau membuat suatu abstrak dari sebuah tulisan. Meringkas menuntut siswa untuk memilih inti dari suatu informasi dan meringkasnya. Istilah lain untuk meringkas adalah membuat generalisasi (*generalising*) dan mengabstraksi (*abstracting*).
5. Menarik inferensi (*inferring*)
Menemukan suatu pola dari sederetan contoh atau fakta. Untuk dapat melakukan inferensi seseorang harus terlebih dapat menarik abstraksi suatu konsep/prinsip berdasarkan sejumlah contoh yang ada. Istilah lain untuk menarik inferensi adalah mengekstrapolasi (*extrapolating*), menginterpolasi (*interpolating*), memprediksi (*predicting*), dan menarik kesimpulan (*concluding*).
6. Membandingkan (*comparing*)
Mendeteksi persamaan dan perbedaan yang dimiliki dua objek, ide, ataupun situasi. Membandingkan mencakup juga menemukan kaitan antara unsur-unsur satu objek atau keadaan dengan unsur yang dimiliki objek atau keadaan lain. Istilah lain untuk membandingkan adalah mengkontraskan (*contrasting*), mencocokkan (*matching*), dan memetakan (*mapping*).
7. Menjelaskan (*explaining*)
Mengkonstruksi dan menggunakan model sebab-akibat dalam suatu sistem. Termasuk dalam menjelaskan adalah menggunakan model tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi apabila salah satu bagian sistem tersebut diubah. Istilah lain untuk menjelaskan adalah mengkonstruksi model (*constructing a model*).

Menurut Daryanto (2008: 106) kemampuan pemahaman dapat dijabarkan

menjadi tiga, yaitu:

1. Menerjemahkan (*translation*)
Pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan (*translation*) arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.
2. Menginterpretasi (*interpretation*)
Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah

kemampuan untuk mengenal dan memahami. Ide utama suatu komunikasi.

3. Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Agak lain dari menerjemahkan dan menafsirkan, tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa

pemahaman memiliki tingkatan yang berbeda-beda antara lain:

1. Menerjemahkan

Menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga diartikan dari suatu konsep abstrak ke dalam bahasa yang lebih sederhana sehingga orang lain mudah memahaminya.

2. Menafsirkan

Menafsirkan adalah kegiatan mengubah dari satu bentuk informasi ke bentuk informasi yang lainnya, misalnya dari kata-kata ke grafik atau gambar, atau sebaliknya, dari kata-kata ke angka, atau sebaliknya, seperti meringkas atau memparafrase.

3. Memberikan contoh

Seseorang yang paham dengan suatu hal secara otomatis akan dapat memberikan contoh terkait hal yang dipahaminya itu. Memberikan contoh menuntut kemampuan mengidentifikasi ciri khas suatu konsep dan selanjutnya menggunakan ciri tersebut untuk membuat contoh

4. Mengklasifikasikan

Seorang yang paham dengan suatu hal, tentunya dapat pula mengenali dan membedakan sesuatu yang dipahami masuk dalam kategori yang seperti apa.

Termasuk dalam kemampuan mengklasifikasikan adalah mengenali ciri-ciri yang dimiliki suatu benda atau fenomena.

5. Menjelaskan

Seorang yang paham dengan suatu hal tentunya dapat menjelaskan kembali hal tersebut kepada orang lain dengan baasanya sendiri. Dalam hal ini menjelaskan berarti mengkonstruksi dan menggunakan model sebab-akibat dalam suatu sistem. Termasuk dalam menjelaskan adalah menggunakan model tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi apabila salah satu bagian sistem tersebut diubah.

2.2.2 Guru Bimbingan dan Konseling

2.2.2.1 Pengertian Guru BK

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menyebutkan “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan angka Kreditnya Pasal 1 menyebutkan ada tiga jenis guru yaitu:

1. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/RA/BA/TKLB dan SD/MI/SDLB dan yang sederajat, kecuali mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta pendidikan agama.

2. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di sekolah/madrasah.
3. Guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah pendidik.

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “Guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah pendidik.”

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan dan konseling adalah guru yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa selaku peserta didik.

2.2.2.2 Tugas-Tugas Guru BK / Konselor

Tugas-tugas konselor dimaksudkan agar konselor mengetahui mengenai tugas-tugasnya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Adapun tugas-tugas konselor menurut Mugiarto (2012: 114) yaitu:

1. Memasyarakatkan bimbingan dan konseling
2. Merencanakan program bimbingan dan konseling
3. Melaksanakan layanan pada berbagai bidang bimbingan terhadap sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya
4. Melaksanakan layanan pada berbagai bidang bimbingan terhadap sejumlah
5. siswa yang menjadi tanggung jawabnya
6. Melaksanakan kegiatan pendukung layanan bimbingan dan konseling
7. Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling
8. Menganalisis hasil evaluasi
9. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis evaluasi

10. Mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling; dan
11. Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru pembimbing.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Pasal 3 dalam di tegaskan bahwa “tugas pokok guru pembimbing adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya”

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang pedoman bimbingan dan konseling di sekolah dasar dan sekolah menengah disebutkan bahwa tugas konselor adalah:

1. Guru BK atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah siswa.
2. Guru BK atau konselor melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yaitu menyusun rencana pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan perbaikan tindak lanjut memanfaatkan hasil evaluasi.
3. Guru BK atau Konselor di beri tugas dengan rasio 1 : 150-160 (satu Guru BK atau Konselor melayani 150-160 orang siswa) pada setiap tahun ajaran dengan ekuivalen 24 jam pembelajaran.
4. Guru BK atau Konselor melaksanakan kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 (dua) jam per kelas (rombongan belajar) per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal. Dan satu kali kegiatan layanan /pendukung bimbingan dan konseling di luar kelas/ di luar jam pembelajaran ekuivalen dengan 2 (dua) jam pembelajaran tatap muka dalam kelas.
5. Jika diperlukan Guru BK atau Konselor yang bertugas di SMP/MTs dan/atau SMA/MA/SMK tersebut dapat diminta bantuan untuk menangani permasalahan peserta didik SD/MI dalam rangka pelayanan alih tangan kasus.

6. Guru BK atau Konselor wajib menguasai spektrum pelayanan pada umumnya, khususnya pelayanan profesional bimbingan dan konseling, meliputi:
 - a. Pengertian, tujuan, prinsip, asas-asas, paradigma, visi dan misi pelayanan bimbingan dan konseling profesional
 - b. Bidang dan materi pelayanan bimbingan dan konseling, termasuk didalamnya materi pendidikan karakter dan arah peminatan siswa
 - c. Jenis layanan, kegiatan pendukung dan format pelayanan bimbingan dan konseling
 - d. Pendekatan, metode, teknik dan media pelayanan bimbingan dan konseling, termasuk di dalamnya perubahan tingkah laku, penanaman nilai-nilai karakter dan peminatan peserta didik.
 - e. Penilaian hasil dan proses layanan bimbingan dan konseling
 - f. Penyusunan program pelayanan bimbingan dan konseling,
 - g. Pengelolaan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling
 - h. Peran organisasi profesi bimbingan dan konseling

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas guru BK

atau konselor adalah melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling dimulai dari menyusun program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya yaitu 150-160 siswa.

2.2.3 Pemahaman Guru BK

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti tentang sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain.

Guru BK adalah tenaga profesional yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk membimbing, mengembangkan kemampuan dan potensi ,

serta melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa selaku peserta didik.

Pemahaman guru BK adalah kemampuan seorang tenaga profesional bidang bimbingan dan konseling yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan menggunakan waktunya untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling untuk mengetahui, mengerti, mengingat pengetahuan dan informasi yang diperoleh dan dapat menjelaskan apa yang dipahaminya dengan baik.

2.3 Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)

Pada Sub bab ini terdapat beberapa teori di dalamnya, diantaranya adalah pengertian musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK), dasar pendirian dan latar belakang musyawarah guru bimbingan dan konseling, peran musyawarah guru bimbingan dan konseling, fungsi musyawarah guru bimbingan dan konseling, tujuan musyawarah guru bimbingan dan konseling, prinsip kerja musyawarah guru bimbingan dan konseling

2.3.1 Pengertian Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)

MGP/MGBK merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru bimbingan dan konseling (konselor) yang berada pada suatu sanggar, kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi / pelaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas (Depdiknas, 2004: 1).

Pendapat serupa disampaikan oleh Kemendiknas (2010: 4) yang menyebutkan MGMP/MGBK merupakan suatu wadah kegiatan bagi para guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling pada jenjang SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMALB/SMK di tingkat kabupaten/kota. Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) selama ini dibina oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Menurut Suparlan (2008: 163) Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk meningkatkan kemampuan guru agar lebih siap dalam menghadapi berbagai kesulitan pembelajaran. Walaupun pada dasarnya MGBK bukan satu-satunya faktor penentu kualitas guru yang diharapkan namun Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) sangat diperlukan sebagai sarana komunikasi bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam mengajar.

Menurut Saondi (2010: 80) MGMP/MGBK merupakan forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran atau guru BK yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan tukar pengalaman yang antar anggota satu dengan lainnya. Wadah komunikasi profesi ini sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan, wawasan, pengetahuan serta pemahaman guru terhadap materi yang diajarkan dan pengembangannya.

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling adalah suatu wadah atau forum musyawarah yang didalamnya terdapat anggota yang berlatar belakang profesi yang sama yaitu dibidang bimbingan dan konseling sebagai konselor, melalui MGBK ini pula guru BK diharapkan dapat

meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling baik di sekolah maupun di luar sekolah.

2.3.2 Dasar Pendirian dan Latar Belakang Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)

Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) didirikan berdasarkan Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan pada alinea 4 dan Bab XII Pendidikan, pasal 31 ayat (1) dan ayat (2). Kemudian Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selain UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adapula dasar yang lain, yaitu peraturan yang menjelaskan tentang wadah atau organisasi profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam pasal 41 dijelaskan bahwa (1) Guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen, (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan pendidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat, (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. (5) Pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dalam pasal 42 Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan: (1) Menetapkan dan menegakkan kode etik guru; (2) Memberikan bantuan hukum kepada guru; (3) Memberikan perlindungan profesi guru; (4) Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan (5) Memajukan pendidikan nasional (Mulyasa, 2008: 48).

Selain itu, terdapat pula peraturan-praturan lainnya, seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Penilaian Kinerja Guru dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Dari peraturan di atas jelas disebutkan bahwa guru selaku tenaga kependidikan diperbolehkan untuk membentuk organisasi profesi. Dimana setiap tenaga kependidikan (guru) diwajibkan untuk mengikuti organisasi profesi tersebut.

Latar belakang terbentuknya MGMP menurut Depdiknas (2008: 4) adalah karena beberapa alasan, yakni sebagai berikut:

1. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa unjuk kerja (*performance* guru) di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sangat bervariasi dan kualifikasi keguruannya beraneka ragam.
2. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya penyesuaian dan pengembangan pendidikan di sekolah.
3. Peningkatan kemampuan profesi guru menuntut adanya wadah antara lain untuk komunikasi, konsultasi, informasi, dan koordinasi sesama guru.

Sementara itu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa MGBK sendiri terbentuk dari MGMP itu sendiri, karena pada hakikatnya MGMP dan MGBK merupakan satu jenis organisasi profesi yang mewadahi para tenaga pendidikan yang ada di Indonesia. Pada awalnya pun MGBK melebur menjadi satu dengan MGMP, namun kemudian MGBK memisahkan diri karena ada perbedaan yang mencolok antara MGMP dan MGBK yakni MGMP yang fungsi dasarnya sebagai wadah guru mata pelajaran, namun MGBK sendiri sebenarnya tidak memberikan pengajaran kepada siswa, MGBK memberikan bimbingan dan materi layanan kepada siswa bukan materi pelajaran, karena hal tersebutlah, lalu kemudian MGBK memisahkan diri dari MGMP. Namun secara umum, MGBK dapat dikatakan sama dengan MGMP.

2.3.3 Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)

Menurut Merton dalam Raho (2007: 6) peranan adalah suatu pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang-orang yang menduduki status tertentu. Sementara peran menurut Soekanto (2009: 212) adalah proses dinamis

sebuah kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Dalam hal ini MGBK sebagai sebuah organisasi tentunya juga memiliki sebuah kedudukan, dimana apabila MGBK telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka secara otomatis MGBK juga menjalankan perannya sebagai sebuah organisasi profesi.

Setiap organisasi tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai sebagai landasan terbentuknya sebuah organisasi, begitu pula dengan MGBK ini. Dikutip dari laman kompasiana.com yang dipublikasi pada tanggal 18 Juni 2015 menyebutkan “Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Guru yang tergabung dalam wadah kegiatan tersebut bisa saling bertukar informasi tentang pembelajaran. Dengan semakin banyaknya informasi pembelajaran yang diperoleh, maka akan semakin meningkat pula mutu proses pembelajaran. Pembelajaran meningkat, apabila mutu guru meningkat”. Menurut Sa’ud (2013: 85) secara umum peranan organisasi asosiasi keprofesian itu meliputi:

1. Melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibawaan kelembagaannya secara keseluruhan/dengan membina dan menegakkan kode etik.

Setiap organisasi tentunya memiliki kepentingan baik itu bagi kepentingan profesi maupun bagi kepentingan individu/anggotanya. Dengan adanya wadah organisasi tersebut khususnya organisasi keprofesian diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada anggota-anggotanya yang tentunya tidak

melanggar kode etik dan norma yang ada dalam profesi tersebut. Menurut direktorat pembinaan pendidik tenaga kependidikan dan ketenagakerjaan perguruan tinggi (2004: 42) kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan di masyarakat. Norma-norma itu berisi apa saja yang boleh, apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan dari tenaga profesi. Apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan peraturan yang berlaku maka orang tersebut akan diberikan sanksi.

2. Berperan meningkatkan dan atau mengembangkan karir.

Meningkatkan dan mengembangkan karir anggota organisasi profesi sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Pengertian karir menurut Tolber dalam Amti dan Marjohan (1991: 121) istilah karir biasanya ditujukan kepada rangkaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang selama hidupnya., sedangkan karir yang dimaksudkan disini adalah perwujudan diri seorang pengemban profesi secara bermakna, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain (lingkungannya) melalui serangkaian aktivitas. Organisasi profesi berperan sebagai fasilitator dan motivator terjadinya peningkatan karir setiap anggota. Sudah menjadi kewajiban organisasi profesi kependidikan untuk mampu memfasilitasi dan memotivasi anggotanya mencapai karir yang diharapkan sesuai dengan tugas yang diembannya, sehingga dalam hal ini organisasi MGBK mampu meningkatkan dan mengembangkan karir berarti mampu memberikan pengaruh terhadap rangkaian dalam perjalanan profesi yang diembannya sebagai konselor.

3. Berperan meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan

Dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi, para pengemban profesi akan memiliki kekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan kemampuan. Sejalan dengan itu, dapat diketahui dengan adanya MGBK ini dapat dijadikan sebagai suatu wadah pemersatu profesi dalam bidang bimbingan dan konseling. Dengan adanya MGBK ini pula dapat memberikan dampak terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan konselor sebagai anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut. Salah satu program kerja dari MGBK yang dikutip dari web resmi MGBK nasional juga menyebutkan bahwa program kerja pengurus MGBK akan menitik beratkan pada upaya di dalam meningkatkan keterampilan atau kemampuan proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang telah dikemukakan Saud di atas.

4. Berperan meningkatkan kewenangan profesional

Melalui wadah organisasi profesi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) ini diharapkan mampu memberikan kewenangan bagi para anggotanya, kewenangan tersebut diantaranya terdapat dalam kode etik profesi konselor yang bersumber pada kode etik ABKIN yang berisi untuk dapat bekerja sebagai konselor diperlukan pengakuan keahlian atau kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan kepada konselor oleh pemerintah yang meliputi kewenangan penyimpanan dan penggunaan informasi, kewenangan dalam melakukan *testing* dan kewenangan dalam melakukan *riset*.

5. Meningkatkan martabat dan kesejahteraan anggotanya

Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) mampu meningkatkan martabat dan kesejahteraan para anggotanya, sehingga profesi konselor dalam bidang bimbingan dan konseling ini benar-benar diakui keberadaannya oleh masyarakat umum. Profesi konselor ini diakui keberadaannya dengan menunjuk pada kredensialisasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang tergabung di dalamnya. Dalam dunia profesi, kemampuan seseorang tenaga profesi atau lembaga yang bersangkutan dengan profesi diuji dan kepadanya diberikan tanda bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar diyakini dan dapat diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas dalam bidang profesi yang dimaksud, dan kredensialisasi tersebut dapat dilihat melalui sertifikasi, akreditasi, dan lisensi. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru.

Sedangkan menurut pedoman MGMP/MGBK Depdiknas (2004: 4)

MGMP/MGBK memiliki peran untuk:

1. Mengakomodir aspirasi dari, oleh dan untuk anggota.
2. Mengakomodasi aspirasi masyarakat/*stakeholder* dan siswa
3. Melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran.
4. Mitra kerja Dinas Pendidikan dalam menyebarkan informasi kebijakan pendidikan.

Sementara itu, Mangkoesapoetra (2004: 3) mengemukakan pendapat yang berbeda tentang peran MGMP/MGBK, peran MGMP/MGBK adalah sebagai berikut:

1. Reformator dalam *classroom reform*, terutama dalam reorientasi pembelajaran efektif.
2. Mediator dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi guru terutama dalam pengembangan kurikulum dan sistem pengujian

3. *Supporting agency* dalam inovasi manajemen kelas dan manajemen sekolah.
4. *Collaborator* terhadap unit terkait dan organisasi profesi yang relevan.
5. *Evaluator dan developer school reform* dalam konteks MPMBS.
6. *Clinical dan academic supervisor* dengan pendekatan penilaian *appraisal*.

2.3.3.1 Aspek-Aspek Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)

Sebelumnya telah dijelaskan di atas mengenai peran dari Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) sebagai sebuah organisasi profesi. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran musyawarah guru bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:

1. Melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibawaan kelebagaannya secara keseluruhan/dengan membina dan menegakkan kode etik profesi.

Setiap organisasi tentunya memiliki kepentingan baik itu bagi kepentingan profesi maupun bagi kepentingan individu/anggotanya. Dengan adanya wadah organisasi tersebut, khususnya organisasi keprofesian, diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada anggota-anggotanya yang tentunya tidak melanggar kode etik dan norma yang ada dalam profesi tersebut. Menurut direktorat pembinaan pendidik tenaga kependidikan dan ketenagakerjaan perguruan tinggi (2004: 42) kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan di masyarakat. Norma-norma tersebut berisikan tentang apa saja yang

boleh, apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan dari tenaga profesi. Jika ada yang melanggar norma tersebut maka akan diberikan sanksi.

2. Berperan meningkatkan dan mengembangkan karir.

Meningkatkan dan mengembangkan karir anggota organisasi profesi sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Pengertian karir menurut Tolber dalam Amti dan Marjohan (1991: 121) istilah karir biasanya ditujukan kepada rangkaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang selama hidupnya., sedangkan karir yang dimaksudkan disini adalah perwujudan diri seorang pengemban profesi secara bermakna, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain (lingkungannya) melalui serangkaian aktivitas. Organisasi profesi berperan sebagai fasilitator dan motivator terjadinya peningkatan karir setiap anggota.

3. Berperan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan

Sebagai suatu wadah pemersatu profesi dalam bidang bimbingan dan konseling, MGBK dapat memberikan dampak terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan konselor sebagai anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut. Salah satu program kerja dari MGBK yang dikutip dari web resmi MGBK nasional juga menyebutkan bahwa program kerja pengurus MGBK akan menitik beratkan pada upaya di dalam meningkatkan keterampilan atau kemampuan proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di luar sekolah.

4. Berperan meningkatkan kewenangan profesional

Melalui Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) ini diharapkan mampu memberikan kewenangan bagi para anggotanya, kewenangan

tersebut diantaranya terdapat dalam kode etik profesi konselor yang bersumber pada kode etik ABKIN yang berisi untuk dapat bekerja sebagai konselor diperlukan pengakuan keahlian atau kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan kepada konselor oleh pemerintah yang meliputi kewenangan penyimpanan dan penggunaan informasi, kewenangan dalam melakukan *testing* dan kewenangan dalam melakukan *riset*.

5. Berperan meningkatkan martabat dan kesejahteraan anggotanya

Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) mampu meningkatkan martabat dan kesejahteraan para anggotanya, sehingga profesi konselor dalam bidang bimbingan dan konseling ini benar-benar diakui keberadaannya oleh masyarakat umum

6. Mengakomodasi aspirasi dari anggota, masyarakat, serta siswa

Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dapat mengakomodasi aspirasi yang disampaikan dari anggotanya, masyarakat dan siswa yang tentunya berkaitan dengan bidang bimbingan dan konseling dan untuk kemajuan dan kebaikan organisasi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) itu sendiri.

7. Melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses pemberian layanan.

Melalui Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) ini diharapkan para anggota dapat saling bertukar informasi dan pengalaman mereka pada bidang bimbingan dan konseling termasuk layanan yang diberikan di sekolah, darisitulah maka akan timbul pemikiran kreatif dan inovatif dari guru BK

dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling agar lebih menyenangkan dari sebelumnya. Selain itu, seperti kita ketahui bahwa MGBK dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan seperti seminar dan pelatihan (*workshop*). Dari kegiatan itulah timbul ide-ide perubahan proses pemberian layanan yang lebih kreatif dan inovatif.

8. Berkolaborasi dengan unit terkait dan organisasi profesi yang relevan, seperti dinas pendidikan dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dapat berkolaborasi dengan dinas pendidikan dan Muswarah Guru Mata Pelajaran terkait hal-hal atau informasi baik tentang guru dan siswa maupun tentang informasi kedinasan.

2.3.4 Fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Setarto dalam Zainal (2008: 22) menjelaskan bahwa fungsi adalah rincian tugas yang sejenis dan erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis atau menurut sifat dan pelaksanaannya. Sedangkan menurut Moekijat, dalam Zainal (2008: 22), menyebutkan bahwa fungsi merupakan suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Adapun fungsi MGMP/MGBK menurut Mangkoesapoetra (2004: 3) adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek serta mengatur jadwal dan tempat kegiatan secara rutin.
2. Memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan MGMP/MGBK secara rutin, baik di tingkat sekolah, wilayah maupun kota.

3. Meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian/evaluasi pembelajaran di kelas sehingga mampu mengupayakan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan disekolah.

Menurut Juwairiah (2014: 6) fungsi dari MGBK adalah sebagai berikut:

1. Fungsi silaturahmi

Dalam hal ini berarti Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dijadikan wadah atau forum bertemunya guru BK atau konselor sekolah dari tiap-tiap sekolah yang ada tingkat kabupaten/kota.

2. Fungsi Informasi

Dalam hal ini berarti MGBK menyediakan berbagai informasi kedinasan yang dibutuhkan anggotanya.

3. Fungsi Produksi

MGBK sebagai suatu forum perkumpulan bagi konselor sekolah atau guru BK dapat pula menyediakan kebutuhan pembelajaran bagi anggotanya, sehingga apabila ada anggotanya yang membutuhkan pembelajaran baru, maka melalui MGBK dapat terleasisi kebutuhannya, kebutuhan pembelajaran tersebut dapat dipenuhi melalui kegiatan seminar, *workshop* atau lainnya yang diselenggarakan oleh MGBK itu sendiri.

4. Fungsi Pengembangan Profesi

Dalam hal ini MGBK dapat memfasilitasi dan memberikan bimbingan serta arahnya kepada para anggotanya dalam pengembangan profesi guru. Misalnya kenaikan pangkat, angka kredit yang dibutuhkan, atau melakukan pendampingan dalam penulisan PTBK.

2.3.4.1 Aspek-Aspek Fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)

Pada penjelasan diatas telah dijelaskan mengenai fungsi dari organisasi profesi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK). Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pemersatu

Kelahiran suatu organisasi profesi sangat erat kaitannya dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan untuk menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. MGBK sebagai suatu organisasi profesi kependidikan merupakan wadah pemersatu berbagai potensi yang dimiliki guru BK dalam menghadapi tantangan dan harapan masyarakat pengguna jasa pendidikan. Dengan mempersatukan potensi tersebut, diharapkan MGBK memiliki kewibawaan dan dapat dilihat oleh masyarakat luas.

Syamsudin (1999: 95) menyebutkan adanya dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Dorongan atau motif tersebut sangat bervariasi, ada yang bersifat sosial, ekonomi, politik, dll. Syamsudin (1999: 95) membagi motif-motif tersebut ke dalam dua motif, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Intrinsik berarti para profesional terdorong oleh keinginannya mendapat kehidupan yang layak, sesuai dengan tugas profesi yang diembannya. Secara ekstrinsik berarti mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks.

2. Fungsi Informasi

MGBK juga berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kedinasan terkait profesi yang diembannya, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan organisasi itu sendiri, dan semua hal yang termasuk bagian dari profesinya, dapat berupa pengalaman dan bertukar pengetahuan yang dimiliki antar anggotanya.

3. Fungsi Produksi

MGBK sebagai suatu forum perkumpulan bagi konselor sekolah atau guru BK dapat menyediakan kebutuhan pembelajaran bagi anggotanya, sehingga apabila ada anggotanya yang membutuhkan pembelajaran baru, maka melalui MGBK dapat terealisasi kebutuhannya, kebutuhan pembelajaran tersebut dapat dipenuhi melalui kegiatan seminar, workshop atau lainnya yang diselenggarakan oleh MGBK itu sendiri.

4. Fungsi Peningkatan Kemampuan Professional

Fungsi ini secara jelas tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi “Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan”. Bahkan dalam UUSPN Tahun 1989 : pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa, “tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa.”

5. Fungsi Pengembangan Profesi

Dalam hal ini MGBK dapat memfasilitasi dan memberikan bimbingan serta arahnya kepada para anggotanya dalam pengembangan profesi guru. Misalnya

kenaikan pangkat, angka kredit yang dibutuhkan, atau melakukan pendampingan dalam penulisan PTBK (Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling).

2.3.5 Tujuan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)

Menurut Mangkoesapoetra (2004: 2) tujuan diselenggarakannya MGMP/MGBK adalah untuk:

1. Memotivasi guru, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional.
2. Meningkatkan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
3. Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, guru, sekolah dan lingkungannya.

Sementara itu, menurut Suparlan (2005: 131) tujuan dari MGMP atau MGBK adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kegairahan guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan belajar mengajar (KBM)
2. Menyertakan kemampuan dan guru dalam melaksanakan KBM sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.
3. Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari cara penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, guru, kondisi sekolah dan lingkungan.
4. Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan keilmuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksanaan kurikulum, metodologi, dan sistem evaluasi sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.
5. Saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

MGMP/MGBK juga mempunyai tujuan secara umum yaitu upaya untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam meningkatkan profesional

guru/konselor. Sementara itu, Depdiknas (2004: 2) menyebutkan tujuan khusus dari diselenggarakannya organisasi MGMP/MGBK adalah sebagai berikut:

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien.
2. Mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan dan mencerdaskan siswa
3. Membangun kerja sama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari MGBK adalah Menumbuhkan wawasan dan keterampilan konselor dalam hal pemberian layanan konseling baik dalam format klasikal, individu maupun kelompok, tempat untuk berbagi (*sharing*) informasi dan permasalahan yang dihadapi oleh para anggota MGBK itu, tempat untuk saling berinteraksi antar guru BK agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap siswa.

2.3.6 Prinsip Kerja Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)

Sebagai sebuah organisasi profesi kependidikan, MGBK tentunya memiliki prinsi kerja yang dikembangkan guna menjaga kinerja dari masing-masing anggota yang terlibat didalamnya. MGBK sangat erat kaitannya dengan MGMP karena MGBK sendiri terbentuk karena adanya Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Berikut ini prinsip kerja MGMP/MGBK menurut Depdikbud (2004: 3) adalah:

1. Merupakan organisasi yang mandiri
2. Dinamika organisasi yang dinamis berlangsung secara alamiah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

3. Mempunyai visi dan misi dalam upaya mengembangkan pelayanan pendidikan khususnya proses pembelajaran dan proses pemberian layanan secara efektif dan efisien.
4. Kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide pembelajaran yang efektif dan efisien.
5. Memiliki anggaran dasar dan rumah tangga (AD-ART) yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan tempat
 - b. Dasar, tujuan dan kegiatan
 - c. Keanggotaan dan kepengurusan
 - d. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus
 - e. Pendanaan
 - f. Mekanisme kerja
 - g. Perubahan AD dan ART serta perubahan pengurus organisasi.

2.4 Pemahaman Guru BK Tentang Peran Dan Fungsi Musyawarah Guru Bimbingan Dan Konseling (MGBK)

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti, mengingat dan memaknai dari suatu informasi yang diterimanya lalu kemudian informasi tersebut dijelaskan kembali dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Guru BK merupakan tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling dengan tugas melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yaitu mendidik, membimbing, dan mengembangkan kemampuan peserta didik (siswa) dalam

memecahkan permasalahan yang dialami dan segala potensi melalui layanan bimbingan dan konseling.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman guru BK adalah seorang tenaga profesional yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa selaku peserta didik dalam rangka mengembangkan dirinya dan mengentaskan permasalahan yang dimiliki oleh peserta didiknya.

Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling merupakan suatu wadah atau forum musyawarah yang didalamnya terdapat anggota yang berlatar belakang profesi yang sama yaitu dibidang bimbingan dan konseling sebagai konselor, melalui MGBK ini pula guru BK diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konseli di sekolah ataupun di luar sekolah.

Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) selaku salah satu organisasi profesi bidang bimbingan dan konseling diantaranya adalah melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibawaan kelebagaannya secara keseluruhan/dengan membina dan menegakkan kode etik profesi, meningkatkan dan mengembangkan karir, berperan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, meningkatkan kewenangan profesional, meningkatkan martabat dan kesejahteraan anggotanya, Mengakomodasi aspirasi dari anggota, masyarakat, serta siswa, melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses pemberian layanan, berkolaborasi dengan unit terkait dan organisasi profesi yang relevan. Sementara itu, Musyawarah Guru Bimbingan

dan Konseling (MGBK) juga memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pemersatu, fungsi informasi, fungsi produksi, dan fungsi peningkatan kemamuan profesional.

Melalui MGBK guru BK dapat menerima atau memberikan informasi kedinasan terkait profesi yang diembannya, dapat menjadi tempat belajar bagi guru BK sehingga dapat meningkatkan kompetensi profesional yang dimiliki guru BK karena didalam MGBK tersedia beragam jenis kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan guru BK, kegiatan tersebut seperti seminar, *workshop*, lokakarya, kolokium dll.

Jadi pemahaman guru BK tentang peran dan fungsi MGBK adalah seorang tenaga profesional bidang bimbingan dan konseling yang mengerti, mengingat, dan memaknai segala informasi atau pengetahuan tentang MGBK serta menjelaskan kembali apa yang dipahaminya tentang peran dan fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK). Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan kembali dijelaskan seperti apa peran dan fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) yang telah disimpulkan dari beberapa pendapat.

2.4.1 Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)

Berikut ini adalah beberapa peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) yang diambil dari beberapa sumber dan kemudian disimpulkan. Sekaligus dapat dijadikan sebagai indikator dalam penelitian ini, yaitu:

1. Melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibawaan kelebagaannya secara keseluruhan/dengan membina dan menegakkan kode etik profesi.

Setiap organisasi tentunya memiliki kepentingan baik itu bagi kepentingan profesi maupun bagi kepentingan individu/anggotanya. Menurut UU No 14 Tahun 2005 pasal 42 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa salah satu kewenangan dari organisasi profesi adalah memberikan perlindungan profesi kepada anggotanya. Dengan adanya wadah organisasi tersebut khususnya organisasi keprofesian diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada anggota-anggotanya yang tentunya tidak melanggar kode etik dan norma yang ada dalam profesi tersebut.

Menurut Latipun (2008: 248) kode etik merupakan kode moral yang menjadi landasan kerja bagi pekerja profesional. Sementara direktorat pembinaan pendidik tenaga kependidikan dan ketenagakerjaan perguruan tinggi (2004: 42) menjelaskan bahwa kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan di masyarakat. Norma-norma tersebut berisikan tentang apa saja yang boleh, apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan dari tenaga profesi. Jika ada yang melanggar norma tersebut maka akan diberikan sanksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sub indikator dari melindungi kepentingan para anggota dan kemandirian dan kewibawaan kelebagaannya secara keseluruhan/dengan membina dan menegakkan kode etik profesi adalah sebagai berikut:

- a. MGBK sebagai organisasi profesi berperan untuk melindungi kepentingan anggotanya.
 - b. MGBK sebagai organisasi profesi berperan untuk melindungi kewibawaan dan kemandirian lembaganya.
 - c. MGBK sebagai organisasi profesi memiliki peran menegakkan kode etik profesi yang diemban oleh profesional bidang bimbingan dan konseling.
2. Berperan meningkatkan dan mengembangkan karir.

Meningkatkan dan mengembangkan karir anggota organisasi profesi sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembannya. Pengertian karir menurut Tolber dalam Amti dan Marjohan (1991: 121) istilah karir biasanya ditujukan kepada rangkaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang selama hidupnya. Sejalan dengan Tolber menurut Gibson dkk (1995: 305), karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Sedangkan karir yang dimaksudkan disini adalah perwujudan diri seorang pengemban profesi secara bermakna, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain (lingkungannya) melalui serangkaian aktivitas.

Organisasi profesi berperan sebagai fasilitator dan motivator terjadinya peningkatan karir setiap anggota. Sudah menjadi kewajiban organisasi profesi kependidikan untuk mampu memfasilitasi dan memotivasi anggotanya mencapai karir yang diharapkan sesuai dengan yang diembannya, sehingga dalam hal ini organisasi MGBK mampu meningkatkan dan mengembangkan karir berarti mampu memberikan pengaruh terhadap rangkaian perjalanan profesi yang

diembannya yakni sebagai guru BK atau konselor sekolah. Menurut Danim (2010: 18) pengembangan profesi dan karir tersebut dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sub indikator dari meningkatkan dan mengembangkan karir adalah sebagai berikut:

- a. MGBK sebagai organisasi profesi yang menaungi guru BK atau konselor sekolah berperan untuk meningkatkan dan mengembangkan karir yang dimiliki oleh anggotanya.
 - b. MGBK sebagai wadah berkumpul guru BK juga memiliki peran untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh guru BK.
3. Berperan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan

Robbin (2007: 57) menjelaskan bahwa kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. MGBK berperan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota merupakan upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal. Dengan kekuatan dan kewibawaan organisasi, para pengemban profesi akan memiliki kekuatan moral untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya.

Sebagai suatu wadah pemersatu profesi dalam bidang bimbingan dan konseling, menurut Saud (2013: 85) salah satu peran MGBK sebagai organisasi profesi adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan guru BK selaku anggota organisasi tersebut. Menurut Danim (2010: 19) peningkatan dan pengembangan kemampuan tersebut dilakukan melalui sistem pembinaan dan

pengembangan keprofesian guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional yang berkaitan dengan perkembangan karir anggotanya.

MGBK dapat memberikan dampak terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan konselor sebagai anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut. Salah satu program kerja dari MGBK yang dikutip dari web resmi MGBK nasional juga menyebutkan bahwa program kerja pengurus MGBK akan menitikberatkan pada upaya di dalam meningkatkan keterampilan atau kemampuan proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di luar sekolah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sub indikator dari meningkatkan dan mengembangkan kemampuan adalah sebagai berikut:

- a. MGBK memiliki peran memberikan kesempatan berdiskusi mengenai permasalahan pembelajaran dalam bidang BK bagi anggotanya.
- b. MGBK berperan untuk menyediakan untuk berdiskusi dan melakukan kegiatan penyusunan Satlan, RPLBK, dan penyusunan program.
- c. MGBK berperan untuk menyediakan tempat untuk berdiskusi dan menganalisis kurikulum yang berlaku.
- d. MGBK berperan untuk menyediakan tempat untuk berdiskusi mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam konseling.
- e. MGBK berperan menyediakan tempat belajar bagi anggotanya untuk melakukan kegiatan penelitian (PTBK) atau kegiatan penulisan karya tulis ilmiah.

f. MGBK berperan memberikan kemampuan tambahan melalui kegiatan seminar, lokakarya, kolokium, dan diskusi panel.

4. Berperan meningkatkan kewenangan profesional

Merupakan upaya para professional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan keemampuannya. Melalui Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) ini diharapkan mampu memberikan kewenangan bagi para anggotanya, kewenangan tersebut diantaranya terdapat dalam kode etik profesi konselor yang bersumber pada kode etik ABKIN (2005: 25) yang berisi untuk dapat bekerja sebagai konselor diperlukan pengakuan keahlian atau kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yang diberikan kepada konselor oleh pemerintah yang meliputi: (1) kewenangan penyimpanan dan penggunaan informasi, kegiatan ini meliputi penyimpanan a) Catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat-menyurat, perekaman, dan data lain, semua merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien, (b) Keterangan mengenai bahan profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya, (c) Kewajiban konselor untuk menangani klien berlangsung selama ada kesempatan antara klien dengan konselor dan kewajiban berakhir jika hubungan konseling berakhir, klien mengakhiri hubungan kerja atau konselor tidak lagi bertugas sebagai konselor. (2) Kewenangan dalam melakukan *testing*. *Testing* diperlukan bila dibutuhkan data tentang sifat atau ciri kepribadian yang menuntut adanya perbandingan dengan sampel yang lebih luas, *data* hasil testing harus diperlakukan setaraf data dan informasi lain tentang klien, kemudian Konselor

harus memberikan orientasi yang tepat kepada klien mengenai alasan digunakannya tes dan apa hubungannya dengan masalahnya. Hasilnya harus disampaikan dengan klien dengan disertai penjelasan tentang arti dan kegunaannya, dan (3) Kewenangan dalam melakukan *riset*. Dalam melakukan riset, harus memperhatikan beberapa hal yakni menghindari hal-hal yang dapat merugikan subyek yang bersangkutan, dan harus menjaga kerahasiaan identitas subyek yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa sub indikator dari memiliki kewenangan professional adalah sebagai berikut:

- a. MGBK berperan membantu anggotanya melakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan kewenangan penyimpanan dan penggunaan informasi.
 - b. MGBK berperan membantu anggotanya untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam menjalankan kewenangan melakukan testing.
 - c. MGBK berperan untuk membantu anggotanya untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam menjalankan kewenangan melakukan riset.
5. Berperan meningkatkan martabat dan kesejahteraan anggotanya

Nurdin (2004: 133) menyebutkan diantara faktor yang menunjang keprofesionalan seorang pemegang profesi adalah adanya pengakuan dari orang lain (masyarakat). Menurut Sudarwan dalam Nurdin (2004: 133) pengembangan profesi memiliki *the elements of superior skill*, sehingga pekerja tersebut pada tingkat sosial dianggap strategis dan pengabdian tenaganya dituntut setiap saat.

Begitu juga dengan orang yang berprofesi sebagai guru, guru yang memerlukan pengakuan dari masyarakat bukan hanya sebagai *agent of change*, tetapi juga pengakuan terhadap profesinya yang layak dimata masyarakat luas. Hal ini juga berkaitan dengan martabat seorang guru BK.

Martabat menurut KBBI artinya harga diri, sedangkan sejahtera berarti aman, sentosa dan makmur. MGBK berperan meningkatkan martabat dan kesejahteraan anggotanya merupakan upaya organisasi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dari pihak lain dan tidak melakukan praktik melecehkan nilai-nilai kemanusiaan serta dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) mampu meningkatkan martabat dan kesejahteraan para anggotanya, sehingga profesi konselor dalam bidang bimbingan dan konseling ini benar-benar diakui keberadaannya oleh masyarakat umum. Profesi konselor akan benar-benar diakui keberadaannya dengan menunjuk pada kredensialisasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan profesi diuji lalu kemudian kepadanya diberikan tanda bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar diyakini dan dapat diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas dalam bidang profesi yang dimaksud.

Menurut Friedman dalam Danim (2010: 65) pengakuan atas suatu pekerjaan menjadi suatu profesi sungguhan dapat ditempuh melalui tiga tahap yaitu: (1) registrasi, adalah suatu aktivitas dimana jika seseorang yang ingin melakukan profesional terlebih dahulu rencananya harus diregristasikan ke kantor registrasi milik Negara. (2) sertifikasi, berarti jika hasil penelitian yang diajukan oleh calon

penyandang profesi dipandang memenuhi persyaratan, maka kepadanya akan diberikan pengakuan oleh Negara atas kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya itu. Bentuk pengakuannya itu berupa pemberian sertifikat kepada penyandang profesi tertentu. (3) lisensi, berarti atas dasar sertifikat yang dimiliki oleh seseorang, barulah orang tersebut memperoleh izin atau lisensi dari Negara untuk mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru BK.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sub indikator dari meningkatkan martabat dan kesejahteraan anggota adalah sebagai berikut:

- a. MGBK berperan untuk meningkatkan martabat anggotanya
- b. MGBK berperan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- c. MGBK berperan untuk mendorong anggotanya untuk melakukan sertifikasi.
6. Mengakomodasi aspirasi dari anggota, masyarakat, serta siswa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akomodasi artinya sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Suryosubroto (2012: 69) hubungan sekolah dengan masyarakat serta hubungan sekolah dengan orang tua siswa pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peran menentukan dalam usaha pembinaan, penumbuhan, dan pengembangan siswa-siswi di sekolah. Hal ini sama dengan hubungan Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dengan masyarakat luas yang dapat memberikan hubungan saling berpengaruh untuk kedua belah pihak.

Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dapat mengakomodasi aspirasi yang disampaikan dari anggotanya, masyarakat dan

siswa yang tentunya berkaitan dengan bidang bimbingan dan konseling dan untuk kemajuan dan kebaikan organisasi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) itu sendiri. Dengan mengakomodasi aspirasi dari anggota, masyarakat dan siswa maka MGBK turut membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, karena dengan adanya hubungan baik antar guru, masyarakat dan siswa dapat menimbulkan komunikasi dua arah yang menciptakan hubungan yang harmonis sehingga memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah-sekolah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sub indikator dari Mengakomodasi aspirasi dari anggota, masyarakat, serta siswa adalah sebagai berikut:

- a. MGBK berperan untuk mengakomodasi aspirasi dari anggotanya.
 - b. MGBK berperan untuk mengakomodasi aspirasi dari masyarakat
 - c. MGBK berperan untuk mengakomodasi aspirasi dari siswa.
7. Melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses pemberian layanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan, sedangkan inovatif bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru Melalui Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) ini diharapkan para anggota dapat saling bertukar informasi dan pengalaman mereka pada bidang bimbingan dan konseling termasuk layanan yang diberikan di sekolah, maka dari itulah akan timbul pemikiran kreatif dan inovatif dari guru BK dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling agar lebih menyenangkan dari sebelumnya. Selain itu, seperti kita ketahui bahwa MGBK dapat

melaksanakan berbagai macam kegiatan seperti seminar dan pelatihan (*workshop*). Dari kegiatan itulah timbul ide-ide perubahan proses pemberian layanan yang lebih kreatif dan inovatif.

Senada dengan penjelasan di atas, salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kreativitas guru adalah pelatihan-pelatihan guru dan organisasi keguruan. Pelatihan-pelatihan guru dan organisasi profesi keguruan sangat bermanfaat bagi guru dalam mengembangkan pengetahuannya serta pengalamannya terutama dalam bidang pendidikan. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, guru dapat menambah wawasan baru bagaimana cara-cara yang efektif dalam proses pembelajaran yang sedang dikembangkan saat ini dan kemudian diterapkan atau untuk menambah perbendaharaan wawasan, gagasan atau ide-ide yang inovatif dan kreatif yang akan semakin meningkatkan kualitas guru.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sub indikator dari melaksanakan perubahan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses pemberian layanan adalah sebagai berikut:

- a. MGBK berperan untuk memberikan perubahan yang kreatif dalam proses pemberian layanan.
 - b. MGBK berperan untuk memberikan perubahan yang inovatif dalam proses pemberian layanan.
8. Berkolaborasi dengan unit terkait dan organisasi profesi yang relevan

Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dapat berkolaborasi dengan unit terkait seperti Perguruan Tinggi, Lembaga Penjamin Mutu

Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan, Organisasi Profesi yang relevan seperti Muswarah Guru Mata Pelajaran terkait hal-hal atau informasi baik tentang guru dan siswa maupun tentang informasi dan kebijakan kedinasan. MGBK berperan untuk berkolaborasi dengan pihak terkait.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh MGBK serta unit-unit terkait adalah (1) mengadakan pertemuan rutin dua atau tiga bulan sekali antara Dinas Pendidikan, Pengawas, MKKS dan pengurus MGBK untuk melaporkan program MGBK yang telah dilakukan dan mengevaluasinya secara bersama-sama. (2) Meningkatkan keterlibatan MGBK dalam kegiatan bersama Dinas Pendidikan setempat dan MKS dalam meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, misalnya kegiatan lomba bidang studi, pemetaan sumber daya guru dan pembinaannya, pelatihan bersama, bintek , simposium karya tulis / PTBK, dan seminar.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sub indikator dari berkolaborasi dengan unit terkait adalah sebagai berikut:

- a. MGBK dapat berkolaborasi dengan dinas pendidikan
- b. MGBK dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi
- c. MGBK mampu berkolaborasi dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
- d. MGBK dapat berkolaborasi dengan organisasi profesi yang relevan seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

2.4.2 Fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK)

Berikut ini fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) yang disimpulkan dari beberapa sumber dan sekaligus dapat dijadikan sebagai indikator dalam penelitian:

1. Fungsi Pemersatu

Kelahiran suatu organisasi profesi sangat erat kaitannya dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan untuk menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. MGBK sebagai suatu organisasi profesi kependidikan merupakan wadah pemersatu berbagai potensi yang dimiliki guru BK dalam menghadapi tantangan dan harapan masyarakat pengguna jasa pendidikan. Dengan mempersatukan potensi tersebut, diharapkan MGBK memiliki kewibawaan dan dapat dilihat oleh masyarakat luas.

Syamsudin (1999: 95) menyebutkan adanya dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Dorongan atau motif tersebut sangat bervariasi, ada yang bersifat sosial, ekonomi, politik, dll. Syamsudin (1999: 95) membagi motif-motif tersebut ke dalam dua motif, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Intrinsik berarti para profesional terdorong oleh keinginannya mendapat kehidupan yang layak, sesuai dengan tugas profesi yang diembannya. Secara ekstrinsik berarti mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sub indikator dari fungsi pemersatu adalah sebagai berikut:

- a. MGBK berfungsi sebagai wadah berkumpulnya para guru BK ditingkat daerah tertentu.
 - b. MGBK berfungsi sebagai tempat untuk mempersatukan persepsi guru BK terhadap pelaksanaan layanan BK di sekolah
2. Fungsi Informasi

Menurut Zakiyudin (2012: 10) informasi merupakan satu sumber daya yang sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. MGBK juga berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kedinasan terkait profesi yang diembannya, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan organisasi itu sendiri, dan semua hal yang termasuk bagian dari profesinya, dapat berupa pengalaman dan bertukar pengetahuan yang dimiliki antar anggotanya.

Fungsi informasi dalam Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) berarti MGBK sebagai wadah berkumpulnya guru BK dapat sekaligus menjadi pusat informasi kedinasan berkaitan dengan profesi guru BK. Seperti dikatakan oleh ketua MGBK SMP kota Semarang Lilis Tri Saktini bahwa ketika ada informasi atau kebijakan baru dari pemerintah, maka secara otomatis dinas pendidikan setempat akan memberikan informasi tersebut kepada MGBK, dan dari MGBK itu akan diteruskan kepada anggota-anggotanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sub indikator dari fungsi informasi ini adalah sebagai berikut:

- a. MGBK berfungsi menjadi pusat informasi yang berkaitan dengan bidang BK

b. MGBK berfungsi sebagai tempat saling bertukarnya informasi yang dimiliki antar guru BK.

3. Fungsi Produksi

Menurut Assauri (2002: 7) produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambahkan kegunaan (*utility*) barang dan jasa pada sebuah perusahaan. Fungsi produksi dapat didefinisikan sebagai hubungan teknis antara input dengan output, yang mana hubungan ini menunjukkan output sebagai fungsi dari input. MGBK sebagai suatu forum perkumpulan bagi konselor sekolah atau guru BK dapat menyediakan kebutuhan pembelajaran bagi anggotanya, sehingga apabila ada anggotanya yang membutuhkan pembelajaran baru, maka melalui MGBK dapat terealisasi kebutuhannya, kebutuhan pembelajaran tersebut dapat dipenuhi melalui kegiatan seminar, workshop atau lainnya yang diselenggarakan oleh MGBK itu sendiri.

Menurut Pindyck dan Rubenfed (2007: 211) sebuah fungsi produksi menunjukkan output tertinggi yang dapat dibuat oleh perusahaan untuk sebuah kombinasi tertentu input produksi. Begitupun dengan adanya MGBK yang memiliki fungsi produksi, dimana MGBK sebagai organisasi profesi guru BK dapat dijadikan sebagai sarana berkumpulnya guru BK setiap sekolah pada satu kota / wilayah. Dalam pertemuan itu tentunya akan banyak yang dibahas, diantaranya adalah membahas hal untuk menentukan bagaimana standar operasional pelaksanaan pemberian layanan yang dilakukan oleh guru pada siswanya. Melalui MGBK ini guru dapat memberikan layanan kepada siswa

sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan, sehingga tidak akan terjadi mal praktik bagi konseli atau siswanya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sub indikator dari fungsi produksi adalah sebagai berikut:

- a. MGBK memiliki fungsi untuk menyediakan kebutuhan belajar bagi anggotanya.
- b. MGBK berfungsi untuk menciptakan atau menetapkan standar operasional layanan dalam BK yang akan diterapkan di sekolah.

4. Fungsi Peningkatan Kemampuan Professional

Pengembangan profesionalisasi guru dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok guru, maupun individu guru sendiri. Profesi guru mempunyai tugas utama untuk melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, menurut Saud (2010: 98) menjelaskan peningkatan kemampuan profesional ini mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka peningkatan kemampuan profesional guru sangat diperlukan dan menjadi sebuah keharusan.

Fungsi peningkatan kemampuan profesional ini secara jelas tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi “Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan”. Bahkan dalam UUSPN Tahun 1989 : pasal 31 ayat 4 menyatakan bahwa, “tenaga kependidikan berkewajiban untuk berusaha

mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan perkembangan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa”.

Saud (2013: 104) mengemukakan bahwa peningkatan kemampuan profesional guru dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Selain itu ada pula dengan cara informal melalui media massa seperti televisi, radio, koran dan majalah maupun publikasi lainnya. Saud (2013: 110) menjelaskan bahwa penggunaan media pemberitaan secara selektif yang terkait dengan bidang yang ditekuni guru akan dapat membantu proses peningkatan profesionalisme guru.

MGBK memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional dimana MGBK sendiri sebagai wadah berkumpulnya guru BK seringkali mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan profesional anggotanya, seperti mengadakan kegiatan seminar, lokakarya ataupun workshop. Kegiatan ini dapat diikuti oleh setiap guru BK. Menurut Saud (2010: 109) partisipasi guru minimal pada kegiatan konferensi atau pertemuan ilmiah setiap tahun akan memberikan kontribusi yang berharga dalam membangun profesionalisme guru dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sub indikator dari fungsi peningkatan kemampuan profesional adalah sebagai berikut:

- a. MGBK berfungsi dalam meningkatkan kemampuan profesional yang dimiliki oleh guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

b. MGBK berfungsi untuk meningkatkan kemampuan professional yang dimiliki oleh guru melalui kegiatan penataran, seminar, lokakarya atau kegiatan ilmiah lainnya yang diadakan MGBK sendiri.

5. Fungsi Pengembangan Profesi

Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan menengah Departemen Pendidikan Nasional dalam Saad (2013: 105) mengemukakan bahwa ada beberapa alternatif program pengembangan profesi guru, yakni sebagai berikut: (1) Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa kualifikasi pendidikan guru adalah minimal S1 dari program keguruan, maka masih ada guru-guru yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karena itu program ini diperuntukkan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 untuk mengikuti pendidikan S1 atau S2 pendidikan keguruan. Program ini berupa program kelanjutan studi dalam bentuk tugas belajar. (2) Program penyetaraan dan sertifikasi. Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan. Keadaan ini terjadi karena sekolah mengalami keterbatasan atau kelebihan guru mata pelajaran tertentu. Sering terjadi kualifikasi pendidikan mereka lebih tinggi dari kualifikasi yang dituntut namun tidak sesuai, misalnya berijazah S1 tetapi bukan kependidikan. Mereka bisa mengikuti program penyetaraan atau sertifikasi.

Dalam hal ini MGBK dapat memfasilitasi dan memberikan bimbingan serta arahnya kepada para anggotanya dalam pengembangan profesi guru. Misalnya seperti yang disebutkan di atas, yakni peningkatan kualifikasi pendidikan guru

yang dapat berhubungan kenaikan pangkat yang akan dijalankan anggotanya, membantu program sertifikasi yang akan dilakukan oleh anggotanya, atau melakukan pendampingan dalam penulisan PTBK (Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sub indikator dari fungsi pengembangan profesi adalah sebagai berikut:

- a. MGBK berfungsi untuk mengembangkan profesi bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi sebagai guru BK dan mendorong anggota untuk mengikuti program penyetaraan atau seertifikasi.
- b. MGBK berfungsi untuk mengembangkan profesi guru BK, misalnya dalam hal kenaikan pangkat, angka kredit, dan melakukan pendampingan dalam penulisan karya ilmiah atau penelitian tindakan bimbingan dan konseling (PTBK).

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa secara umum tingkat pemahaman guru BK tentang peran dan fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) di SMP Negeri se-Kota Semarang berada pada posisi tinggi. Secara khusus dapat disimpulkan bahwa:

5.1.1 Tingkat pemahaman guru BK tentang peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) berada pada kategori tinggi. Terdapat dua indikator yang memiliki kecenderungan hasil yang lebih tinggi dibandingkan indikator lainnya yaitu indikator mengakomodasi aspirasi dari anggota, masyarakat, dan siswa serta indikator berperan berkolaborasi dengan unit terkait dan organisasi profesi yang relevan.

5.1.2 Tingkat pemahaman guru BK tentang fungsi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) berada pada kategori tinggi. Terdapat satu indikator yang memiliki kecenderungan lebih tinggi dibandingkan indikator lainnya yaitu indikator fungsi peningkatan kemampuan profesional.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan, maka peneliti dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi kepala dinas pendidikan kota Semarang, dapat melakukan pembinaan terkait agenda kegiatan atau pertemuan yang dilakukan oleh MGBK, agar MGBK dapat meningkatkan agenda pertemuan atau kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan pemerintah, sehingga dapat meningkatkan pemahaman guru BK tentang peran MGBK untuk meningkatkan dan mengembangkan karir anggotanya, dan meningkatkan pemahaman guru BK tentang fungsi MGBK khususnya fungsi pemersatu.
- 5.2.1 Bagi Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh MGBK, memberikan semangat kepada guru BK agar rajin mengikuti kegiatan atau pertemuan yang diadakan oleh MGBK.

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. 2005. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Bimbingan dan Konseling, Standar Kompetensi Konselor*
- Amti, Erman dan Marjohan. 1991. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Depdikbud
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Assauri, Sofyan. 2002. *Manajemen Pemasaran (Dalam Konsep dan Strategi)*. Jakarta: Rajawali Grafindo
- Atmowinoto, Tongato. 2015. *Peran MGMP/MGBK*. Dipublish melalui kompasiana.com (diakses pada tanggal 25 April 2016 pukul 14.53 WIB)
- Basuki, Tentrem. 2015. *Peran Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) dan Kompetensi Profesional Guru BK di SMP Negeri Se-Kota Semarang*. Skripsi: Universitas Negeri Semarang
- Budi, T. P. 2006. *SPSS 13.00 Terapan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Cahyono, Edi dkk. 2014. *Panduan Penulisan Proposal, Tugas Akhir, Skripsi dan Artikel Ilmiah*. Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNNES
- Danim, Sudarwan. 2010. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta
- Darmawan. 2014. Pengaruh Kegiatan MGBK dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling di SMA se-Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan*. 2: 357-364
- Daryanto. 2008. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Depdiknas. 2004. *Pedoman MGMP*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Depdiknas. 2009. *Rambu-Rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Standar Pengembangan Kelompok Kerja (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)*. Jakarta: Depdiknas
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagakerjaan Perguruan Tinggi. 2004. *Dasar Standardisasi Profesi Konseling*. Jakarta: Depdiknas
- Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Depdiknas.
- Efendi, Gusfar dkk. 2013. Kompetensi Sosial Guru BK/Konselor Sekolah (Studi Deskriptif di SMA Negeri Kota Padang). *Jurnal Ilmiah Konseling*. 2: 162- 166
- Farisi, Imam. 2013. Dinamika Organisasi Profesional Kependidikan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan*. 42: 67-83
- Hendra, AW. 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ikatan Konselor Indonesia. 2008. *Arah Pemikiran dan Pengembangan Profesi Konselor*. Padang: IKI
- Juwairiah. 2014. *Profesionalisme Guru Dalam Melaksanakan KKG dan MGMP*. Medan: Balai Diklat Keagamaan Medan
- Kartadinata, Sunaryo. 2005. *Standarisasi Profesi Bimbingan dan Konseling*. Makalah disajikan dalam Konvensi Nasional XIV dan Kongres Nasional ABKIN. Semarang. 13-16 April
- Kemendikbud. 2015. *Pedoman Pemberian Dana Bantuan Peningkatan Karir PTK SMP Melalui MGMP SMP tahun 2015*. Jakarta: Direktorat pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
- Latipun. 2008. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press
- Mangkoespoetra, Arif. 2004. *Memberdayakan MGMP sebuah Keniscayaan*. Artikel. [http://www. Artikel.us/art_05-14.htm](http://www.Artikel.us/art_05-14.htm). Diakses pada tanggal 25 Mei 2016
- Mardapi, D. 2008. *Teknik Penyusunan Instrumen tes dan Non Tes*. Yogyakarta: Mitra Cendekia
- Munandar, Ashar Sunyoto. 2014. *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)

- Mulyasa,E. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Pengantar Pendidikan Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Nurdin, Muhammad. 2004. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: Prisma Sophie
- Pindyk, Robert dan Rubinfeld, Daniel. 2007. *Mikroekonomi: Edisi Keenam, Jilid 1*. Jakarta: Indeks
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Saifuddin, Azwar. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saud, Udin Saefudin. 2013. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta
- Saondi, Ondi dan Aris Suherman. 2010. *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Setyawan, Hendra. 2016. *Semarang Kekurangan Guru BK*. Dipublish melalui SuaraMerdeka.com (diunduh pada tanggal 12 Desember 2016 pukul 15.30 WIB)
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 2006. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Soekanto, Surjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soetjipto dan Rafllis Kosasi. 2011. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudaryono. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryosubroto, B. 2012. *Hubungan Sekolah dengan Masyarakat (School Public Relations)*. Jakarta: Rineka Cipta

- Sutoyo, Anwar. 2009. *Pemahaman Individu (Observasi, Cheklist, Kuesioner & Sosiometri)*. Semarang: Grafindo Persada
- Suherman, AS. 2007. *Proses Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syamsudin, M Abin. 1999. *Pengembangan Profesi dan Kinerja Tenaga Kependidikan*. Bandung: UPI
- Triatna, Cipi. 2015. *Perilaku Organisasi Dalam Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Wijaya, Bellinda Mega Candy. 2015. *Pengetahuan, Persepsi dan Sikap Konselor Terhadap Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Malang*. Skripsi: Universitas Negeri Malang
- Willis, Sofyan. 2007. *Konseling Individual: Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Agus dan Nanik Prihartanti. 2013. Peranan Musyawarah Guru Pembimbing (MGP) Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pembimbing SMP Kabupaten Boyolali. *Jurnal Penelitian Humaniora*. 2: 71-84
- Wursanto. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi
- Zainal, Nining Haslinda. 2008. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi Dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makasar*. Skripsi: Universitas Hasanuddin Makasar
- Zakiyudin, Ais. 2012. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- <http://mgbk-indonesia.org> (diunduh pada tanggal 11 Desember 2016 pukul 09.15 WIB)